

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian tentang Peranan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dengan model regresi berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk Belanja Daerahnya juga semakin tinggi.
2. Hasil analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dengan model regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk Belanja Daerahnya juga semakin tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota DIY bisa lebih menggali potensi PAD dengan cara meningkatkan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah harus ditingkatkan karena pajak daerah salah satu PAD yang paling tinggi sebagai penerimaan daerah serta bertujuan untuk menambah PAD dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Pajak daerah sangat diperlukan untuk investasi potensi masing-masing jenis pajak daerah sehingga diperoleh data mengenai potensi pajak yang akurat. Retribusi daerah, yang tidak mampu menghasilkan penerimaan memadai dan menghapuskannya dan memperbaiki sistem pemungutan pajak dalam rangka mengurangi biaya tinggi dalam pengelolaan pajak dan menggali potensi-potensi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota DIY harus bisa meminimalkan sumber dana dari pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi umum dan diharapkan lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada tranfer dana dari pemerintah pusat
3. Perencanaannya lebih ditingkatkan agar jumlah belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sama dengan anggarannya. Dan dapat diketahui bahwa besarnya BD lebih banyak dipengaruhi oleh

jumlah DAU yang di terima dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika dibiarkan berlanjut maka dapat dikhawatirkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.